

## Comparison of State Administration Management between Egypt and Indonesia

Ziddane Rafian<sup>1</sup>, Dhiya Fariyyah Maritza<sup>2\*</sup>, Rafel Lina<sup>3</sup>, Mawadah Latifah<sup>4</sup>,  
Saila Mahfira<sup>5</sup>

Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Corresponding Author:** Dhiya Fariyyah Maritza, [dhiyafahriyyah@gmail.com](mailto:dhiyafahriyyah@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Egypt, Indonesia,  
State administration

*Received :* 8, June

*Revised :* 23, June

*Accepted:* 20, July

©2024 Rafian, Maritza, Lina,  
Latifah, Mahfira: This is an  
open-access article distributed  
under the terms of the [Creative  
Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Comparison of state administration is carried out as tips for improving a country towards an effective and efficient form and management of government in bringing the country towards prosperity and progress. The comparative science of state administration has a function as a benchmark in management and problem-solving. Egypt and Indonesia have a variety of unique things to compare and study. This research studies the state administration of Egypt and Indonesia which includes the form of the state, government system, political system, political infrastructure as well as the factors that underlie the creation of state administration such as social factors, moral factors, cultural factors and territorial factors. Differences and similarities were found in the comparisons prepared using this literature study method, such as similarities in the government system which is divided into regions that have their own authority and autonomous powers. There are also similarities in the political system which adheres to the freedom of many parties to participate in becoming candidates for government institutions such as the legislative body and heads of state or regions such as the President. The differences can be seen in the government system, Indonesia uses a presidential government system while Egypt uses a semi-presidential government system.

## Perbandingan Pengelolaan Administrasi Negara Antara Mesir dan Indonesia

Ziddane Rafian<sup>1\*</sup>, Dhiya Fariyyah Maritza<sup>2</sup>, Rafel Lina<sup>3</sup>, Mawadah Latifah<sup>4</sup>,  
Saila Mahfira<sup>5</sup>

Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Corresponding Author:** Dhiya Fariyyah Maritza, [dhiyafahriyyah@gmail.com](mailto:dhiyafahriyyah@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Administrasi  
Negara, Indonesia, Mesir,  
Perbandingan

*Received :* 4, Juni

*Revised :* 18, Juni

*Accepted:* 15, Juli

©2024 Rafian, Maritza, Lina,  
Latifah, Mahfira: This is an  
open-access article distributed  
under the terms of the [Creative  
Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### A B S T R A K

Perbandingan administrasi negara dilakukan sebagai kiat-kiat penyempurnaan suatu negara menuju bentuk dan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam membawa negaranya menuju kesejahteraan dan kemajuan. Ilmu perbandingan administrasi negara memiliki fungsi sebagai tolak ukur dalam pengelolaan serta pemecahan masalah. Mesir dan Indonesia memiliki beragam keunikan untuk dibandingkan dan dipelajari. Penelitian ini mempelajari administrasi negara Mesir dan Indonesia yang meliputi bentuk negara, sistem pemerintahan, sistem politik, infrastruktur politik serta faktor-faktor yang mendasari pembuatan administrasi negara seperti faktor sosial, faktor moral, faktor budaya, dan faktor teritorial. Ditemukan perbedaan dan persamaan dalam perbandingan yang disusun melakukan metode studi kepustakaan ini seperti persamaan pada sistem pemerintahan yang terbagi menjadi daerah-daerah yang memiliki kewenangan serta kekuasaan otonomnya sendiri. Terdapat persamaan pula sistem politik yang menganut kebebasan banyak partai untuk berpartisipasi dalam menjadi kandidat lembaga-lembaga pemerintahan seperti lembaga legislatif dan kepala negara atau daerah seperti Presiden. Perbedaan terlihat di sistem pemerintahan, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Presidensial sedangkan mesir menggunakan sistem pemerintahan semipresidensial

---

## PENDAHULUAN

Setiap negara pasti memiliki kekurangan dan kelebihan dalam mengelola negaranya. Dalam artian lain berarti tidak ada negara yang sempurna dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu Robert E. Dahl (1947) mengemukakan konsep perbandingan administrasi negara dalam konferensi Princeton dengan tujuan membandingkan konsep administrasi negara-negara yang lebih sistematis dan membahas permasalahan yang hadir pada setiap negara yang hadir dalam konferensi tersebut. Administrasi merupakan konsep yang mengedepankan pembagian tugas dalam sebuah organisasi sehingga proses berjalannya atau dilaksanakannya suatu tugas tersebut dapat dilakukan secara sistematis (Kartiwa, 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan administrasi negara adalah kegiatan untuk membandingkan proses administrasi yang berjalan dalam suatu negara, yang meliputi proses penyelenggaraan serta pembagian tugas dalam menjalankan pemerintahan, proses kerja sama dalam menjalankan tugas tersebut, proses pencapaian tujuan dari tugas yang sudah direncanakan dalam sebuah sistem pemerintahan. Perbandingan administrasi negara dilakukan dengan beberapa aspek pendekatan sesuai dengan kebutuhan praktis serta kebutuhan teoritis dari kedua negara yang menjalankan perbandingan administrasi negara.

Secara umum, perbandingan administrasi dapat dikaji secara luas oleh siapapun untuk membandingkan sistem administrasi dan pemerintahan dari dua negara atau lebih. Hal tersebut dilakukan untuk menelaah dan mengetahui kekurangan serta kelebihan yang dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan tempat pemerintahan tersebut dijalankan karena pada dasarnya, administrasi negara ditetapkan juga berdasarkan budaya yang ada pada daerah tersebut sebelum adanya sistem pemerintahan. Indonesia dan Mesir memiliki persamaan pada mayoritas agama yang dimiliki oleh warganya, yaitu Islam. Persamaan ini dapat dijadikan objek perbandingan dengan melihat aspek-aspek lain apakah terdapat kesamaan bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, tata kekuasaan dan sistem politik dalam kedua negara tersebut. Beberapa aspek penting yang dapat dinilai untuk membandingkan administrasi negara khususnya antara Indonesia dan Mesir meliputi Bentuk Pemerintahan, khususnya bentuk sistem yang diterapkan di masing-masing negara. Ini berkaitan dengan strukturnya dalam posisi dan wewenang pemerintah sehingga penting untuk dinilai dalam membandingkan administrasi negara; Kemampuan dalam pengelolaan ekonomi, khususnya dalam sektor tertentu seperti pertanian, industri, pertambangan, dan lain-lain; Sumber daya alam yang ada di masing-masing negara.

## PELAKSANAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*study research*). Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis materi dari banyak literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya seperti. Dalam melakukan studi kepustakaan, dilakukan 4 tahap, yaitu menyediakan alat untuk mencari sumber literatur dalam hal ini adalah sumber-sumber untuk mencari jurnal,

buku, hasil penelitian terdahulu yang bisa dijumpai dalam platform seperti *Google Scholar*, *springer*, *sciencedirect* dan lainnya. Kedua, dilakukan pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu perbandingan administrasi negara antara Indonesia dan Mesir. Ketiga, dilakukan pengorganisasian waktu untuk menelaah hasil temuan pustaka dan tahap terakhir adalah membaca hasil temuan pustaka serta memahami isi untuk kemudian disusun sebagai pedoman atau rujukan penelitian isi dari penelitian ini (Alam dan Cahyono, n.d.)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Bentuk Negara***

Bentuk negara mengacu pada struktur dan organisasi pemerintahan yang dimiliki oleh suatu negara secara resmi. Secara umum, bentuk negara terbagi menjadi beberapa macam seperti Monarki, Republik, Federal, Konstitusional, dan sebagainya. Setiap bentuk tersebut memiliki karakteristik khusus mengenai cara kerja pemerintahan dan cara mengelola serta alur pemerintahan yang terjadi di dalamnya. Bentuk negara ditetapkan untuk membantu negara dalam membuat landasan sebagai alat pencapaian tujuan. Bentuk negara Indonesia adalah republik sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi

*“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”*

Negara kesatuan berarti sistem pemerintahan dan kekuasaan tertinggi di Indonesia dipegang oleh pemerintah pusat sementara republik berarti kepala negara Indonesia dipimpin oleh presiden dan berdiri sebagai sebuah satu kesatuan yang keseluruhan daerah otonom berada di bawah presiden dan tidak berjalan sendiri.

Mesir memiliki bentuk negara Republik sebagaimana tersebut dalam nama resmi mereka yaitu Republik Arab Mesir dengan negara yang dikepalai oleh presiden. Bentuk negara Mesir sudah ditetapkan sejak 18 Juni 1953 Kepala negara Mesir adalah presiden yang dipilih dalam proses demokrasi oleh rakyat.

### ***Sistem Pemerintahan***

Sistem pemerintahan merupakan sistem hukum yang mencakup peraturan, norma, dan struktur pemerintahan. Hal ini berlaku baik untuk monarki maupun republik, dengan fokus khusus pada hubungan antar pemerintah dan badan atau lembaga yang mewakili rakyat. Sistem hukum tersebut bertujuan untuk mengatur hak-hak, kewajiban, dan kekuasaan masing-masing bagian yang terlibat dalam pemerintahan sehingga tercipta keseimbangan dan transparansi dalam kegiatan pemerintahan (Hamzah, 2016). Sistem pemerintahan pada umumnya terbagi menjadi tiga berdasarkan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam tata pemerintahan. Ketiga sistem pemerintahan, yaitu presidensial yang dipimpin oleh presiden, parlemen yang dipimpin oleh badan-badan parlementer dan semi-presidensial yang dipimpin oleh dua pemimpin yaitu presiden yang dipilih langsung oleh rakyat biasanya melalui pemilihan umum, dan perdana menteri yang dipilih oleh presiden atau oleh badan eksekutif sebagai representasi sistem pemerintahan.

Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam Pasa 4 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*”. Ayat tersebut berarti bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang mana seluruh badan pemerintahan seperti lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan legislatif berada di bawah kekuasaan presiden dan bertanggungjawabkan tugasnya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Sistem administratif di Indonesia dibagi berdasarkan provinsi dan kota/kabupaten yang masing-masing daerahnya memiliki daerah otonomnya masing-masing dan berkewenangan mengatur daerahnya sendiri namun masih dibawah oleh pemerintah pusat.

Mesir Menggunakan sistem pemerintahan semipresidensial multipartai yang mana terjadi pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri dalam ruang lingkup pemerintahan. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan perdana menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan, namun dalam beberapa laporan perdana menteri tidak memiliki kekuasaan yang sama besar dengan presiden sehingga urusan pemerintahan masih dikuasai atau didominasi oleh presiden. Presiden mesir dipilih oleh rakyat sejak tahun 2005, sebelumnya presiden dipilih oleh partai dengan sistem multipartai. pembagian administratif di mesir juga memiliki sistem yang sama dengan Indonesia dan terbagi menjadi tiga tingkat yang mana distrik menjadi tingkat terendah.

### ***Sistem & Infrastruktur Politik***

Sistem politik demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat menjadi landasan pemerintahan dan hak suara serta keputusan yang diambil dalam sistem pemerintahan diperhitungkan berdasarkan suara mayoritas. Di sini, rakyat memiliki hak untuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemilihan, partisipasi dalam kegiatan kebijakan negara, serta hak untuk menentukan dan mengawasi pemerintah melalui alat pemerintahan seperti pegawai dan aparatur negara. Indonesia dan Mesir sama-sama memiliki sistem politik demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum sebagai bentuk pengambilan suara dan pewujudan sistem demokrasi. Di Indonesia, pemilihan umum dilakukan untuk memilih lembaga-lembaga legislatif yang memiliki titel sebagai “wakil rakyat” seperti, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota dan Presiden. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali dihitung dari masing-masing tingkatan jabatan kepala pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah tersebut sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara serempak untuk tiap-tiap pemerintahan daerah. Di Mesir, pemilihan umum dilakukan untuk memilih Presiden dan anggota parlemen yang dilakukan setiap 6 tahun sekali.

Dengan adanya pemilihan umum, memunculkan infrastruktur politik seperti partai-partai politik yang di Indonesia dan Mesir jumlahnya sudah lebih dari 20. Partai politik ini hadir untuk mengisi bangku kekuasaan. Hadirnya juga organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan baik politik maupun kepentingan individu yang menyuarakan hak-hak rakyat kepada pemerintah. Sebagai negara yang memiliki sistem politik demokrasi, media massa dan tokoh-

tokoh masyarakat juga hadir sebagai bentuk kebebasan rakyat dalam mengekspresikan diri dan mengawasi kinerja pemerintah yang sudah dipilih oleh rakyat.

### ***Faktor Moralitas dan Sosial Budaya***

Faktor moralitas adalah kumpulan nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang dianut oleh seseorang untuk melakukan tindakan suatu hal. Faktor ini sangat penting dalam mempengaruhi seseorang untuk membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hal ini berarti sebagai sebuah negara, moralitas hadir dari kepercayaan dan prinsip yang dimiliki dan disetujui oleh warga secara keseluruhan. Faktor moralitas memiliki peran penting dalam membuat keputusan, menghormati hak-hak manusia, serta merawat lingkungan sekitar dimana individu menjalankan hidupnya. Faktor moralitas bisa berhubungan dengan agama, budaya, keluarga, dan lingkungan (Kartiwa, 2012). Faktor moralitas di Indonesia dan Mesir dapat dilihat melalui nilai moral etika dan budaya, permasalahan dalam negeri seperti permasalahan korupsi, pendidikan, dan kebudayaan, disiplin, etos kerja dan tingkat nasionalisme dalam warga negara, serta citra dan reputasi dalam perspektif Internasional.

- Nilai moral dan etika budaya

Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya sehingga nilai kebudayaan di alam negeri sudah diatur dengan rasa empati dan toleransi yang tinggi dalam masing-masing warganya. Nilai moral dan etika budaya di Mesir dipengaruhi oleh nilai-nilai konservatif dari negara Arab disekitarnya.

- Permasalahan dalam negeri

Upaya pemberantasan korupsi banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk pemberian sanksi kepada segala bentuk korupsi dalam pemerintah, bisnis, dan segala aktivitas lain. Ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan integritas dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut berkebalikan dengan negara mesir yang memiliki masalah korupsi yang lebih parah yang dibarengi dengan rendahnya tingkat produktivitas. Di Mesir juga timbul masalah toleransi karena warganya cenderung berasal dari suku yang homogen sehingga mereka tidak terbiasa dengan adanya perbedaan dalam kehidupan berwarga negara.

- Disiplin, etos kerja dan tingkat nasionalisme

Etos kerja di Indonesia dinilai baik dilihat dari sikap dan perilaku yang memotivasi seseorang untuk bekerja dengan semangat, kreativitas, dan produktivitas cukup tinggi. Semangat wirausaha di Indonesia didorong untuk memulai dan mengembangkan usaha baru dan inovatif. Semangat wirausaha di Indonesia dilihat dari perkembangan bisnis-bisnis baru yang mulai bermunculan terutama pasca pandemi Covid-19. Nasionalisme kuat pasca-kemerdekaan adalah sikap atau perasaan kuat untuk cinta tanah air dan bangsa, sehingga memotivasi seseorang untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Indonesia sendiri memiliki warga yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dilihat dari

keikutsertaan warganya dalam kegiatan-kegiatan nasional seperti merayakan hari kemerdekaan dan mendukung kontingen-kontingen negara dalam perhelatan olahraga. Di Mesir, etos kerja, semangat wirausaha dan rasa nasionalisme cenderung rendah

- Citra dan reputasi dalam perspektif Internasional

Dalam perspektif internasional Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah yang sangat luas sehingga menjadikannya penting dalam perspektif internasional. Posisi geografis Indonesia yang penting sebagai "*Gateway*" antara Asia dengan Australia membuatnya memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan posisi strategisnya, Indonesia memiliki pengaruh dalam hubungan internasional khususnya dalam forum internasional seperti PBB, APEC, IMF, WTO, G20, dan ASEAN. Mesir secara historis merupakan bagian penting dari peradaban manusia dan memiliki pengaruh besar dalam budaya, ekonomi, politik, dan agama. Dari perspektif internasional, posisi geografisnya yang penting dan sumber daya alamnya yang besar membuatnya menjadi anggota yang penting dalam forum internasional seperti PBB, Liga Arab, G 77, serta anggota aktif dalam beberapa perjanjian internasional seperti GATT, WTO, dan Perjanjian Konvensi Río mengenai Perubahan Iklim. Selain itu, Mesir penting dalam gerakan perdamaian Timur Tengah

### ***Faktor Teritorial***

Faktor teritorial adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi sistem administrasi negara dan pembentukan kebijakan yang terdapat dalam negara tersebut. Faktor teritorial dapat meliputi letak geografis yang mana Indonesia terletak di dua benua dan samudra yang menjadikan jalur perdagangan aktif antar negara melalui jalur pelayaran. Letaknya dalam jalur perdagangan ini membuat administrasi negara di Indonesia juga berfokus pada pengaturan batas-batas wilayah dan kepengurusan birokrasi dengan tujuan melindungi sumber daya Negara dari kapal-kapal yang berlalu-lalang. Mesir berada di setting wilayah dataran yang dikelilingi oleh negara arab yang perekonomiannya digerakan oleh industri minyak dan gas sehingga administrasi negara di mesir berfokus pada tugas-tugas pengolahan hasil bumi. Faktor selanjutnya adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menjadi penentu seperti apa sistem pemerintahan sebaiknya dijalankan. Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah 270 juta penduduk. Banyaknya jumlah penduduk ini menjadi pertimbangan dalam pengaturan administrasi negara untuk mengawasi perilaku serta sistem pemerintahan yang terjadi dalam lingkungan hidup bermasyarakat. Administrasi negara juga berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan terhadap warganya dilihat dari seberapa padat wilayah yang dikelola. Mesir sendiri memiliki kepadatan penduduk yang relatif lebih kecil dari Indonesia sehingga administrasi negaranya menyesuaikan kepada jumlah penduduk yang tersebar kedalam 37 distrik di daerahnya

Kondisi politik regional terhadap administrasi negara bisa sangat mempengaruhi proses pelaksanaan administrasi. Beberapa kondisi politik regional seperti konflik, ekstremisme, dan politik identitas berpotensi merusak kelancaran administrasi serta stabilitas negara. Kondisi tersebut juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dapat meningkatkan ketegangan dalam pemerintahan. Akan tetapi, kondisi politik regional yang harmonis dan stabil akan memberikan dampak positif dalam administrasi sehingga meningkatkan pembangunan nasional. Kondisi politik di Mesir sangat rumit dengan penyebaran ekstremisme, konflik antar kelompok, dan krisis politik yang sering terjadi. Ketegangan terus meningkat antara pemerintah sementara dengan kelompok oposisi, seperti Ikhwanul Muslimin. Krisis ekonomi juga terus meningkat dengan tingkat pengangguran yang tinggi serta tingkat inflasi yang memburuk. Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan pembangunan serta meningkatkan stabilitas nasional. Kondisi politik regional di Indonesia berkembang dari kondisi konflik di masa orde lama menjadi kondisi yang lebih stabil dan berkembang baik dalam demokrasi serta ekonomi. Namun, beberapa masalah terus timbul seperti masalah terorisme, konflik lokal, serta peningkatan masalah intoleransi. Kondisi tersebut menghambat terciptanya stabilitas sehingga perlu perbaikan serta tindakan konkret untuk meningkatkan ketertiban dan kelestarian demokrasi nasional. Lebih lanjut, kondisi politik di setiap provinsi dan kota di Indonesia juga mempengaruhi situasi secara individual dengan memiliki posisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Kondisi tersebut mempengaruhi komposisi dan kebijakan, khususnya dalam masalah identitas, pemerataan pembangunan, serta kelestarian stabilitas nasional.

Disamping itu, faktor sumber daya alam seperti tanah, air, kekayaan bawah tanah, dan keanekaragaman hayati sangat penting dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan nasional. Keberadaan sumber daya alam tersebut memberikan pengaruh kepada pembangunan nasional khususnya dalam sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Selain itu, sumber daya alam tersebut memberikan posisi kuat dalam hubungan internasional serta potensi ekonomi yang mampu meningkatkan pengembangan nasional. Sumber daya alam yang mempengaruhi kebijakan nasional di Indonesia, khususnya dalam administrasi termasuk sumber daya pertanian seperti tanah, air, minyak sawit, kopra, kelapa, padi, kakao, karet, dll. Sumber daya di bidang lainnya, yaitu sumber daya alam non-pertanian seperti perkebunan, tambang, gas alam, batu bara, nikel, tembaga, emas, krom, kayu, ikan, dan lainnya. Di Mesir, sumber daya alam yang sangat mempengaruhi kebijakan dan administrasi negara termasuk Sungai Nil, tanah berpasir, perminyakan, emas, batu bara, bauksit, fosfat, dan mineral lain. Sumber daya tersebut memberikan posisi kuat dalam ekonomi nasional khususnya dalam sektor pertanian, konstruksi, dan industri.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Perbandingan administrasi negara antara Mesir dan Indonesia menunjukkan beberapa persamaan, seperti dalam hal sistem pemerintahan yang sama-sama mengutamakan bentuk demokrasi dan memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Kebebasan dalam

berpartai politik juga tercermin dalam kedua negara dengan hadirnya banyak partai politik yang bersaing secara sehat untuk menjabat dalam sistem pemerintahan. Perbedaan yang hadir di kedua terlihat dalam sistem pemerintahan yang mana Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang dikepalai oleh presiden (presidensial) yang tercantum dalam UUD 1945 sementara Mesir menggunakan sistem pemerintahan yang dikepalai oleh perdana menteri sementara kepala negaranya adalah presiden (semi presidensial). Perbedaan ini hadir sesuai kebutuhan dan kebudayaan yang hadir dalam negara tersebut.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Ibu Dini Gandini Purbaningrum, S.IP, M.A selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Administrasi Publik yang telah mengarahkan untuk menyusun penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 9 yang sudah bekerja sama dalam menyusun penelitian ini, dan terima kasih kepada peneliti terdahulu yang telah mempublikasikan dan mengizinkan karyanya untuk digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, F. K., dan Cahyono, A. Eko. (n.d.). Perbandingan Modernisasi Pendidikan Islam Mesir dan Indonesia. *RAUDHAH*.
- Anggara, Sahya. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara*. Pustaka Setia Bandung
- Ardiansyah. (2022). *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*. CV. Budi Utama
- Embassy of the Republic of Indonesia in Cairo, Egypt. (2018). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/cairo/en/read/mesir/1900/etc-menu>
- Mahkamah Konstitusi, dan Hamzah, Guntur. (2016). *Sistem Pemerintahan Negara: Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*. [Diklat]
- Nugraha, Budi et al. (2022). *Teori Administrasi*. PT. Global Eksekutif Teknologi